



**MORES**; Jurnal Pendidikan Hukum, Politik, dan Kewarganegaraan  
website: <http://mores.stkipasundan.ac.id/index.php>

**MORES**; Jurnal Pendidikan Hukum, Politik, dan Kewarganegaraan,  
7(2).2025, hlm. 17-26

## OPTIMALISASI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA CIKONENG MELALUI PEMBERDAYAAN PERTANIAN

**Nurul Rodiah Musyarofah, Neneng Triuspita, Yudi Kusyadi**  
*Prodi. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, STKIP Pasundan Cimahi*  
[Nurulrodiah32@gmail.com](mailto:Nurulrodiah32@gmail.com)

**Naskah diterima :** 7 Juni 2025 **Naskah direvisi:** 7 Juni 2025 **Naskah disetujui :** 30 Juli 2025

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peranan pemerintah Desa Cikoneng dalam pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian padi guna mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat desa. Metode deskriptif kualitatif digunakan dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan meliputi aparat pemerintah desa, petani, serta tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan, seperti penyuluhan, pelatihan, penyediaan bibit unggul, dan bantuan alat pertanian, meningkatkan pengetahuan, keterampilan petani, dan produktivitas pertanian padi. Hambatan meliputi keterbatasan anggaran, SDM yang terbatas, dan infrastruktur pertanian yang kurang memadai. Meskipun demikian, implementasi kebijakan ini memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pendapatan petani. Penelitian ini menyarankan peningkatan partisipasi masyarakat, alternatif sumber pendanaan, pengembangan SDM, dan optimalisasi koordinasi dengan lembaga terkait untuk optimalisasi pemberdayaan.

**Kata kunci :** Kesejahteraan Masyarakat, Pemberdayaan Pertanian, Partisipasi Masyarakat, Pertanian padi

### ABSTRACT

*This research examines the role of the Cikoneng Village government in community empowerment in rice farming to optimize the welfare of the village community. A descriptive qualitative method was used with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. Informants included village government officials, farmers, and community leaders. The results showed that empowerment programs, such as counseling, training, provision of superior seeds, and agricultural equipment assistance, improved farmers' knowledge, skills, and productivity in rice farming. Obstacles include budget constraints, limited human resources, and inadequate agricultural infrastructure. Nonetheless, the implementation of this policy had a positive impact on community welfare by increasing farmers' income. This research suggests increasing community participation, alternative funding sources, developing human resources, and optimizing coordination with related institutions to optimize empowerment.*

**Keywords :** Community Welfare, Agricultural Empowerment, Community Participation, Rice farming

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara agraris memiliki kelimpahan hasil pertanian yang melimpah (Rhofita, 2022, hlm. 82). Hal ini disebabkan oleh kondisi geografis yang mendukung, seperti tanah yang subur dan iklim tropis yang ideal untuk berbagai jenis tanaman. Dari Sabang hingga Merauke, berbagai macam tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hingga tanaman obat-obatan tumbuh dengan subur (Khadarisna & Qonita, 2022, hlm. 98). Hasil-hasil pertanian ini tidak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga diekspor ke berbagai negara di seluruh dunia.

Data Kementerian Pertanian (2023) menunjukkan bahwa Indonesia memiliki lebih dari 30 produk pertanian berkualitas tinggi seperti beras, jagung, kedelai, kelapa sawit, karet, dan kakao, yang tersebar di berbagai provinsi. Perlu diketahui bahwa setiap daerah di Indonesia mempunyai keunggulan komparatif dalam produksi produk pertanian tertentu. Seperti yang diungkapkan Mulyani (2021, hlm. 5), “contoh, wilayah Sumatera merupakan penghasil utama minyak sawit dan karet, sedangkan Jawa Timur terkenal dengan hasil panen padi dan tebu yang tinggi.”

Selain itu, wilayah timur Indonesia juga mempunyai potensi yang sangat besar. Menurut data terakhir BPS (2023), provinsi seperti Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Selatan memiliki potensi besar dalam produksi produk pertanian seperti kopi, coklat, dan rempah-rempah. Hlm ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara agraris terbesar di dunia. Namun potensi tersebut juga menghadapi berbagai tantangan, antara lain perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam, serta kurangnya teknologi dan infrastruktur yang memadai. Sebagaimana dinyatakan dalam laporan Bank Dunia (2022), “Peningkatan ketahanan pertanian dan pembangunan infrastruktur yang inklusif adalah kunci untuk memaksimalkan potensi pertanian Indonesia.” Dalam konteks ini, pemerintah perlu terus mengembangkan kebijakan dan program pemberdayaan pertanian berkelanjutan serta memperkuat kerja sama antar daerah untuk memastikan potensi pertanian Indonesia dimanfaatkan

secara optimal dan mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat.

Pemberdayaan pertanian telah lama menjadi strategi utama dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan di berbagai belahan dunia (FAO, 2016). Di Indonesia, terutama di Desa Cikoneng, pertanian padi menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat dengan kontribusi signifikan terhadap pendapatan dan penghidupan mereka (Badan Pusat Statistik, 2020). Namun, tantangan seperti perubahan iklim, keterbatasan akses terhadap teknologi, dan infrastruktur yang terbatas menghambat potensi penuh dari sektor pertanian ini untuk menghasilkan manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat desa.

Pemerintah Desa Cikoneng memiliki peran penting dalam memfasilitasi dan mendorong pemberdayaan masyarakat melalui program-program pertanian yang berkelanjutan (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2021). Upaya-upaya ini mencakup penyuluhan, pelatihan teknis, pengadaan bibit unggul, serta bantuan peralatan pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan agroekosistem (Sulaiman et al., 2018).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa integrasi berbagai kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan pertanian dapat secara signifikan meningkatkan pendapatan petani dan secara keseluruhan mengurangi tingkat kemiskinan di masyarakat desa (World Bank, 2019). Namun, untuk mencapai hasil yang optimal, diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal dalam merancang dan melaksanakan program-program ini.

Kendati demikian, implementasi program pemberdayaan pertanian tidaklah tanpa tantangan. Masih ada masalah terkait dengan keterbatasan anggaran, kurangnya keahlian teknis di tingkat lokal, serta infrastruktur yang belum memadai untuk mendukung pertumbuhan sektor pertanian (Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan, 2020). Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap faktor-faktor penghambat ini guna mengoptimalkan

efektivitas dari upaya pemberdayaan yang dilakukan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi peran pemerintah Desa Cikoneng dalam upaya pemberdayaan pertanian padi dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Dengan mempertimbangkan konteks lokal dan tantangan yang dihadapi, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang konstruktif untuk meningkatkan efektivitas program pemberdayaan dan mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, pemerintah pusat maupun daerah mengeluarkan kebijakan baru yang bertujuan untuk memperkuat peran dan kemandirian desa melalui Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Undang-undang ini harus mampu mengubah cara pandang dalam sistem pembangunan Indonesia (Akmal, 2021, hlm. 298). Pelaksanaan pemerintahan yang baik diharapkan berkembang di tengah masyarakat seiring dengan semakin tingginya kompleksitas permasalahan bangsa dalam berbagai aspek penyelenggaraan negara (Al Azis, 2022, hlm. 25). Berbagai aspek kehidupan desa akan diatur secara lebih komprehensif, antara lain pengelolaan sumber daya alam, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan berbagai program pembangunan lainnya. Pemerintah menekankan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui serangkaian program pembangunan yang lebih tepat sasaran dan komprehensif, termasuk penguatan ekonomi lokal, pengembangan pariwisata lokal, dan industri kreatif.

Perkembangan Desa merupakan suatu keadaan tertentu yang dicapai oleh penduduknya dalam menyelenggarakan kehidupan dan mengelola sumber daya yang ada. Upaya pemerintah dalam suatu daerah sangat berperan penting dalam mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat (Amantha, 2021, hlm. 69). Setiap daerah memiliki cara tersendiri dan setiap daerah memiliki cara yang berbeda-beda dalam mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat, di daerah

Cikoneng ini termasuk salah satu desa yang terkondisikan alam perbukitan, pegunungan, dan persawahan sehingga menunjukkan kawasan desa Cikoneng memiliki sumber daya alam yang memadai. Dengan demikian, salah satu upaya untuk mengoptimalkan kondisi ekonomi masyarakat yaitu melalui sektor pertanian seperti pertanian padi, labu, umbi-umbian dan lainnya. Dimana pemerintah desa memperbaiki kehidupan masyarakat dengan cara mengoptimalkan harga produk yang dihasilkan atau pendapatan mereka. Melalui sektor pertanian ini, pemerintah dapat mengoptimalkan potensi desa karena sektor pertanian memiliki peran yang sangat penting dan menentukan baik tidaknya soal pangan maupun ekonomi (Isbah, 2016, hlm. 46).

Berdasarkan hasil observasi kedua peneliti pada tanggal 3 Juni 2024, Ada beberapa inisiatif yang telah diambil untuk mengoptimalkan kondisi ekonomi masyarakat Desa Cikoneng. Salah satunya adalah dengan memperkenalkan teknik pertanian yang lebih modern dan efisien, seperti penggunaan bibit unggul dan sistem irigasi yang lebih baik. Selain itu, program pemerintah dan bantuan dari berbagai organisasi non-pemerintah juga sangat membantu dalam mengoptimalkan produksi padi dan pendapatan petani. Pelatihan dan penyuluhan tentang diversifikasi pertanian dan cara memasarkan produk pertanian juga memberikan dampak positif. Dengan demikian, meskipun tantangan ekonomi di Desa Cikoneng cukup besar, ada peluang untuk mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai inisiatif dan dukungan yang tepat. Kolaborasi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat desa sendiri sangat diperlukan untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan merata (Antono, dkk. 2020, hlm.103). Pertanian padi yang menjadi andalan desa ini dapat lebih dioptimalkan untuk mengoptimalkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Oleh karena itu, desa memiliki peran yang cukup penting dalam memberikan pelayanan untuk mengoptimalkan kesejahteraan hidup masyarakat. Pemerintah desa secara umum memiliki

wewenang yang sangat strategis untuk mengendalikan kehidupan masyarakat atau dengan kata lain, pemerintah desa memiliki seperangkat aturan baku yang tertulis dan sudah ditetapkan pemerintah pusat yang termuat dalam UU No. 6 Tahun 2014 yang harus ditaati oleh masyarakat yang hidup dan tinggal di desa tersebut. Berdasarkan hasil observasi yang dilaksanakan oleh peneliti di Desa Cikoneng yang terletak di Kecamatan Pasirjambu, memiliki potensi pertanian yang sangat signifikan sebagai salah satu sektor utama dalam ekonomi masyarakat. Pemerintah desa telah menerapkan berbagai program pemberdayaan pertanian untuk mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat hambatan yang dapat menghambat keberhasilan dan dampak positif dari program tersebut.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada tanggal 25 Mei 2024. Masyarakat Desa Cikoneng dihadapkan pada beragam kendala dalam mengimplementasikan program pemberdayaan pertanian. Faktor-faktor seperti keterbatasan sumber daya, akses terhadap teknologi, dan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dapat mempengaruhi efektivitas program tersebut (Chambers, R. 1993, hlm. 54). Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terkait hambatan-hambatan ini menjadi krusial untuk merumuskan strategi perbaikan dan mengoptimalkan hasil program pemberdayaan pertanian di Desa Cikoneng. Selain itu, penting untuk menganalisis secara rinci pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian oleh pemerintah Desa Cikoneng. Informasi terkait proses pelaksanaan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, serta tantangan yang dihadapi dapat memberikan gambaran komprehensif tentang dinamika program tersebut.

Evaluasi terhadap efektivitas kebijakan pemerintah desa juga menjadi perhatian utama dalam rangka mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat di sektor pertanian (Isbah, 2016, hlm. 48). Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki sejauh mana kebijakan yang telah diterapkan mampu mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan dan

identifikasi dampak positif yang dapat diukur untuk mendukung perbaikan kebijakan di masa mendatang. Desa Cikoneng memiliki struktur perekonomian yang didominasi dengan sektor pertanian padi. Jenis pertanian ini termasuk tanaman yang paling unggul namun terkadang masih terkendala oleh pupuk dan juga aliran air yang tidak merata sehingga menyebabkan kekeringan di beberapa tempat pertanian. Sehingga pemerintah desa berupaya untuk memperbaiki tata kelola yang belum maksimal seperti kelangkaan pada pupuk juga aliran air. Dalam mengoptimalkan upaya pengembangan maka perlu adanya efektivitas pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana sasaran yang dapat dicapai oleh pemerintah. Semakin tepat sasaran maka semakin efektif kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan, sehingga petani semakin produktif dan menguntungkan dalam usaha taninya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis terdorong untuk meneliti tentang “Peranan Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pertanian untuk mengoptimalkan Kesejahteraan Desa Cikoneng”

## **METODE (14pt, bold)**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Menurut Sugiyono (2018, hlm. 14) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif lebih menekan pada makna. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.

Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya dan dapat memberikan informasi yang mutakhir

sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah. penelitian deskripsi secara garis besar merupakan kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran atau mencoba mencandra suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN (**

### **1. Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pertanian Padi oleh Desa Cikoneng**

Pemerintah Desa Cikoneng melaksanakan program pemberdayaan pertanian padi untuk mengoptimalkan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Program ini melibatkan penyuluhan pertanian, bantuan bibit unggul, dan penggunaan teknologi pertanian modern, yang meningkatkan pengetahuan petani tentang teknik budidaya padi efektif dan ramah lingkungan. Kerja sama antara masyarakat dan pemerintah sangat diperlukan untuk keberhasilan program ini.

Lahirnya Undang-undang Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, dalam undang-undang ini menjelaskan bagai mana stretegi dalam pemberdayaan petani yaitu dengan cara pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembanga sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi danjaminan luasan lahan pertanian, penyediaan fasilitas pembiayaan dan pemodalan, kemudahan akses ilmu pengetahuan teknologi dan informasi, dan penguatan kelembagaan petani.

Menurut Widiyanto dan rekan-rekan (2021, hlm. 28), peningkatan peran dan pemberdayaan masyarakat desa untuk kesejahteraan memerlukan kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah. Salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan mengadakan program-program yang mengembangkan sektor pertanian, terutama bagi petani padi. Pemerintah Desa menyelenggarakan program pemberdayaan desa yang mencakup berbagai kegiatan, seperti penyuluhan pertanian, pemberian bantuan bibit

unggul, serta penerapan teknologi pertanian modern. Melalui penyuluhan, petani memperoleh pengetahuan tentang teknik budidaya padi yang lebih efektif dan ramah lingkungan.

Menurut Damanik & Saragih (2021, hlm. 112), meskipun pelatihan formal belum diadakan, penyuluhan sering dilaksanakan dengan bantuan pembimbing lapangan pertanian. Penyuluhan ini memberikan panduan berkebun dan penanaman padi yang baik kepada masyarakat. Kehadiran pembimbing lapangan sangat penting karena mereka memberikan pengetahuan praktis yang dapat langsung diterapkan oleh petani di lapangan. Penyuluhan ini juga membantu petani memahami teknik pertanian yang lebih efisien dan berkelanjutan, sehingga dapat mengoptimalkan hasil panen dan kesejahteraan mereka. Pelaksanaan penyuluhan yang fleksibel menjadi keunggulan dalam program pemberdayaan ini. Penyuluhan dapat dilakukan di berbagai lokasi seperti kantor desa, wilayah kelompok tani, atau wilayah RW, sehingga mempermudah akses petani terhadap pengetahuan baru dan mengurangi hambatan geografis. Setiap petani memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan meningkatkan keterampilan mereka. Namun, masih ada kebutuhan untuk mengadakan pelatihan formal yang lebih terstruktur. Pelatihan formal dapat memberikan pengetahuan yang lebih mendalam dan sistematis serta membuka peluang bagi petani untuk mendapatkan sertifikasi yang dapat meningkatkan kredibilitas mereka. Pemerintah desa perlu mempertimbangkan untuk mengalokasikan anggaran dan sumber daya untuk mengadakan pelatihan ini, mungkin dengan bekerjasama dengan lembaga pendidikan atau organisasi pertanian (Ruru dkk., 2017, hlm. 84). Secara keseluruhan, upaya Pemerintah Desa Cikoneng dalam memberdayakan masyarakat melalui pembentukan kelompok tani dan penyuluhan patut diapresiasi. Namun, peningkatan lebih lanjut diperlukan, terutama dalam bentuk pelatihan formal yang lebih terstruktur, agar petani di Desa Cikoneng dapat lebih siap menghadapi tantangan pertanian modern dan mengoptimalkan

kesejahteraan mereka secara berkelanjutan.

## **2. Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa Cikoneng dalam Mengoptimalkan Kesejahteraan Masyarakat di Sektor Pertanian Padi**

Implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, pemerintah, maupun swasta untuk mencapai tujuan tertentu (Widodo, 2010: 87). Proses ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain komunikasi, sumber daya, komitmen, struktur birokrasi, konten kebijakan, konteks kebijakan, kapasitas intervensi pemerintah, dan kondisi sosial ekonomi. Dalam hal ini, Desa Cikoneng telah menerapkan beberapa kebijakan yang bertujuan untuk mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat di sektor pertanian padi.

Pemerintah desa juga telah menyediakan pelatihan bagi petani terkait teknik budidaya padi, termasuk penanaman bibit dan penggunaan pupuk organik. Meskipun pelatihan ini ada, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan karena beberapa bibit yang digunakan kurang cocok dengan kondisi tanah lokal. Ini menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan dalam program pelatihan agar lebih sesuai dengan kondisi setempat dan kebutuhan petani. Dukungan pemerintah dalam bentuk fasilitas-fasilitas yang dapat digunakan oleh petani sangat berarti bagi mereka, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan di sektor pertanian (Arifiyanti dkk., 2023, hlm. 686). Dukungan ini membantu mengurangi pengeluaran petani dan mengoptimalkan efisiensi pengelolaan lahan. Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa tantangan yang masih perlu diatasi, upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Cikoneng sudah memberikan dampak positif bagi kesejahteraan petani dan produktivitas pertanian di wilayah tersebut.

## **3. Hambatan dalam Mengimplementasikan Program Pemberdayaan Pertanian Padi di Desa Cikoneng**

Mengimplementasikan program pemberdayaan pertanian padi di Desa Cikoneng dapat menghadapi beberapa kendala. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan dana yang dialami oleh petani. Meskipun memiliki lahan yang luas dan potensi besar untuk menghasilkan padi, petani sering kali tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk membeli benih, alat penggarap, dan pupuk yang diperlukan. Selain itu, dalam beberapa kasus, petani juga tidak memiliki akses yang memadai ke pasar untuk menjual hasil panen mereka, sehingga mereka tidak bisa mendapatkan harga yang adil.

Hambatan lain yang dihadapi adalah keterbatasan infrastruktur yang mendukung pertanian padi. Infrastruktur yang tidak memadai dapat menghambat proses irigasi dan mengurangi hasil panen. Selain itu, keterbatasan infrastruktur juga dapat menghalangi akses masyarakat ke fasilitas penting seperti jalan, air, dan listrik. Tantangan lain adalah kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Petani yang tidak menyadari pentingnya pemberdayaan pertanian padi dapat menghambat proses pemberdayaan (Mutmainah, 2015). Selain itu, kurangnya partisipasi masyarakat juga dapat menjadi penghambat, karena petani yang tidak terlibat aktif dalam kegiatan pemberdayaan tidak dapat memperoleh bantuan yang diperlukan. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, beberapa strategi dapat dilakukan.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, diperlukan pendekatan yang holistik dan terkoordinasi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, swasta, dan komunitas petani sendiri. Peningkatan akses terhadap pendidikan, teknologi, sumber daya keuangan, serta perbaikan infrastruktur dan sistem pasar dapat membantu mengurangi hambatan-hambatan tersebut (Komang Ariyanto, 2022, hlm. 166). Berdasarkan hasil wawancara dan observasi mengenai hambatan-hambatan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa hambatan dalam mengimplementasikan program pemberdayaan pertanian padi di Desa Cikoneng, yang disebabkan oleh perbedaan kultur wilayah atau tanah, dapat diatasi dengan cara berikut:

Pemerintah Desa Cikoneng menghadapi berbagai tantangan dalam memperkuat sektor pertanian padi. Setiap wilayah memiliki karakteristik unik, mulai dari topografi hingga pola iklim yang berbeda. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah desa untuk memahami dan menyesuaikan program pemberdayaan pertanian padi dengan kondisi masing-masing wilayah. Misalnya, wilayah dengan curah hujan tinggi mungkin memerlukan strategi irigasi yang lebih baik untuk mengatasi risiko kekeringan, sementara wilayah dengan tanah yang subur mungkin membutuhkan pendekatan yang berbeda dalam manajemen tanah dan pupuk.

Dengan memperhitungkan faktor-faktor ini secara cermat, pemerintah Desa Cikoneng dapat menentukan jenis pertanian yang paling cocok untuk setiap wilayah, sehingga mengoptimalkan produktivitas dan keberlanjutan pertanian. Selain itu, penyesuaian jenis pertanian dengan kondisi lokal juga dapat mengurangi risiko terhadap bencana alam dan perubahan iklim, serta mengoptimalkan ketahanan pangan masyarakat setempat. Dengan demikian, pendekatan yang berbasis pada pemahaman mendalam terhadap kondisi lokal menjadi kunci dalam merancang program pemberdayaan pertanian yang efektif dan berkelanjutan di Desa Cikoneng.

## **SIMPULAN**

Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pertanian Padi oleh Pemerintah Desa Cikoneng. Pemerintah Desa Cikoneng melaksanakan program pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian padi melalui berbagai kegiatan, seperti pelatihan pertanian, penyuluhan, penyediaan bibit unggul, dan bantuan alat pertanian. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani, mengoptimalkan produksi padi, serta meningkatkan kesejahteraan petani. Secara umum, program-program tersebut berjalan dengan baik dan mendapatkan respons positif dari masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat dalam setiap kegiatan juga

menunjukkan bahwa program ini diterima dengan baik dan dianggap bermanfaat.

Dampak Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Sektor Pertanian Padi. Implementasi kebijakan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat di sektor pertanian padi telah memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Cikoneng. Program-program ini berhasil mengoptimalkan produktivitas pertanian padi, yang berdampak langsung pada peningkatan pendapatan petani, meskipun beberapa wilayah masih menghadapi ketidakstabilan karena keterbatasan akses. Selain itu, pelatihan dan penyuluhan yang diberikan telah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani, sehingga mereka lebih mampu mengelola lahan secara efektif dan efisien. Meskipun masih terdapat beberapa hambatan, secara keseluruhan kebijakan ini telah membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat di sektor pertanian padi.

Hambatan dalam Implementasi Program Pemberdayaan Pertanian Padi di Desa Cikoneng. Pemerintah Desa Cikoneng menghadapi beberapa hambatan dalam mengimplementasikan program pemberdayaan pertanian padi. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia yang terampil, dan keterbatasan infrastruktur pertanian seperti irigasi dan akses jalan ke lahan pertanian. Selain itu, beberapa petani masih enggan mengadopsi teknologi baru karena ketidakpastian hasil dan kurangnya pengetahuan. Kurangnya koordinasi antara pemerintah desa dan lembaga terkait juga menjadi kendala dalam optimalisasi program ini.

## **REFERENSI (14pt, bold)**

- "Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2023",  
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Akmal, D. U. (2021). Penataan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Upaya Penguatan Sistem Hukum Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*,

- 18(3), 296.  
<https://doi.org/10.54629/jli.v18i3.761>
- Al Azis, M. V. N. (2022). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Di Desa Kertamukti Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 7(1), 23–31.  
<https://doi.org/10.33701/jipsk.v7i1.2404>
- Amantha, G. K. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Mengoptimalkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 67–79.  
<https://doi.org/10.33701/jipwp.v47i1.1490>
- Arifiyanti, N., Kurniyanto, I. R., & Destiarni, R. P. (2023). Peran pemerintah terhadap pembangunan fasilitas pertanian di Kabupaten Bangkalan. *AGRISCIENCE*, 3(3), 685–698.  
<https://doi.org/10.21107/agriscience.v3i3.19397>
- Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS): Laporan Triwulanan atau Tahunan.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Statistik Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Chambers, R. (1993). "Rural Development: Putting the Last First." London: Longman.
- Daftar Referensi jurnal
- Damanik, D. W., & Saragih, J. (2021). Peran Pembimbing Klinik Terhadap Kepuasan Mahasiswa Pada Pengalaman Praktek Klinik Lapangan Pertama. 4(1).
- FAO. (2016). *The State of Food and Agriculture 2016*. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- Isbah, U. (2016). Analisis Peran Sektor Pertanian Dalam Perekonomian Dan Kesempatan Kerja Di Provinsi Riau.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2021). *Laporan Tahunan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- Kementerian Pertanian. (2023). *Laporan Tahunan Kebijakan Pertanian 2023*
- Khadarisna, S., & Qonita, A. (2022). Identifikasi Kinerja Subsektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Dan Jasa Pertanian Dalam Pembangunan Perekonomian Di Kabupaten Tulungagung. 10, 97– 111.
- Komang Ariyanto, K. A. (2022). Intervensi Pemerintah Desa dalam Program Pembangunan Pertanian: Suatu Pendekatan Ekonomi Politik di Konteks UU Desa 2014. *JIAP: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia*, 3(2), 164–180.  
<https://doi.org/10.33830/jiapi.v3i2.108>
- Mulyani, S. (2021). "Potensi dan Tantangan Pertanian Indonesia dalam Perspektif Geografi Ekonomi." *Jurnal Geografi Ekonomi*, 5(2), 78-91.
- Mutmainah, R., & . S. (2015). Peran Kepemimpinan Kelompok Tani Dan Efektivitas Pemberdayaan Petani. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 2(3).  
<https://doi.org/10.22500/sodality.v2i3.9425>



- Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan. (2020). Laporan Tahunan: Peran Pertanian dalam Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan.
- Rhofita, E. I. R. (2022). Optimalisasi Sumber Daya Pertanian Indonesia untuk Mendukung Program Ketahanan Pangan dan Energi Nasional. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 28(1), 82. <https://doi.org/10.22146/jkn.71642>
- Ruru, N., Kalangi, L., & Budiarmo, N. S. (2017). Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Upaya Mengoptimalkan Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Desa Suwaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara). *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(01). <https://doi.org/10.32400/gc.12.01.17140.2017>
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sulaiman, T., Sumardjoko, I., & Santoso, S. (2018). Strategi Pemberdayaan Petani Padi melalui Program Pelatihan Teknis di Jawa Tengah. *Jurnal Agro Ekonomi*, 36(2), 89-102.
- Widiyanto, D., Istiqomah, A., & Yasnanto, Y. (2021). Upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Perspektif Kesejahteraan Ekonomi. *Jurnal Kalacakra: Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 2(1), 26. <https://doi.org/10.31002/kalacakra.v2i1.3621>
- Widodo, T. (2020). Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Pertanian Berkelanjutan. *Jurnal Agroindustri*, 4(1), 18-28.
- World Bank. (2019). *Agricultural Development and Economic Growth: A Review of the Literature*. Washington, DC: World Bank.
- World Bank. (2022). "Agrarian Resilience: Strengthening Agricultural Development in Indonesia." Washington, DC: World Bank.